



Tim Khusus Usut Pungli di Tingkat Kecamatan

YOGYAKARTA (SI) - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta melalui Bagian Tata Pemerintahan (Tapem) membentuk tim khusus untuk mengusut dugaan adanya pungutan liar (pungli) di kecamatan dan kelurahan.

Kabag Tapem Purwanto mengatakan, tim monitoring yang dibentuk beranggotakan lintas instansi, ada dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil), Tapem dan Badan Pengawas Daerah (Bawasda). Siapapun Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang nantinya terbukti melakukan pungli akan ditindak tegas sesuai peraturan perundangan yang berlaku. "Bisa dalam bentuk teguran, pemotongan gaji dan sanksi lain yang lebih berat," katanya kemarin.

Beberapa camat sudah diundang untuk diklarifikasi atas kemungkinan adanya pungutan tersebut. Alasan yang disampaikan pejabat di tingkat kecamatan adalah, mereka tidak turut campur dalam kepengurusan identitas warga. Baik kepengurusan KTP maupun KK jadi kewenangan Dispendukcapil.

Tim khusus yang dibentuk Pemkot ini, lanjut dia, nantinya juga melakukan sidak (inspeksi mendadak) setiap kelurahan. Targetnya adalah mengamankan kotak-kotak sumbangan yang tidak ada pertanggungjawaban, yang jelas. "Penyediaan kotak-kotak sumbangan tidak ada pengaturannya baik dalam Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Wali Kota (Perwal). Pemkot tidak pernah menyarankan untuk melakukan itu," dalihnya.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Yogyakarta, Ardianto berharap melalui cara tersebut, proses perijinan dan kepengurusan surat-surat identitas bisa berjalan secara optimal. "Tentu kami tidak berharap jika sidak ini dilakukan hanya sekedar formalitas saja. Jika memang ditemukan ada pungli, harus ada sikap tegas, bukan ditutup-tutupi," terangnya.

(arif budianto)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Tata Pemerintahan	Positif	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Kependudukan dan Catatan			
3. Inspektorat			

Yogyakarta, 19 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005